



Polarisasi Sosial dalam Pemilu dan Penyebaran Disinformasi di Media Sosial: Studi Kasus Masyarakat Kota Medan

Social Polarization in Elections and the Spread of Disinformation on Social Media: A Case Study of Medan City Community

**Kaisyah Adellia Riadi^{1*}, Keiza Azzahra Salsabila², Ira Nurhidayah³,
Jihan Rafeyfa Syafitri⁴, Nailah Salwa Harahap⁵**

Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara

Email: kaisyahadellia@student.usu.ac.id^{1*}, keizaazzahra@student.usu.ac.id², iranurhidayah@student.usu.ac.id³,
jihanrafeyfa@student.usu.ac.id⁴, nailahsalwa@student.usu.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received : 27-05-2026

Revised : 29-05-2026

Accepted : 31-05-2026

Published : 03-06-2026

Abstract

This study examines the phenomenon of social polarization during elections and the spread of disinformation on social media among the public in Medan City. The development of social media, which has become a means of political communication, has facilitated the dissemination of information, but it has also given rise to many forms of disinformation that can influence public political views. The purpose of this study is to determine the relationship between the spread of disinformation on social media and the emergence of social polarization among the people of Medan City during the elections. This research was conducted through a literature review, and the results indicate that the presence of social media plays a significant role in strengthening differing political views, increasing the spread of hoaxes, and triggering conflict and social division within the community. Social polarization occurs because people accept information that aligns with their political views without first verifying the facts. Low digital literacy is also a factor accelerating the spread of disinformation. This study concludes that the spread of disinformation significantly influenced the increase in social polarization during the elections in Medan City. Therefore, improving digital literacy, monitoring the dissemination of information in the media, and providing political education to the public are essential to minimize the negative impacts of social polarization.

Keywords: Social Polarization, Elections, Disinformation

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai fenomena polarisasi sosial dalam pemilu dan penyebaran disinformasi di media sosial pada masyarakat di Kota Medan. Perkembangan media sosial yang telah menjadi sarana komunikasi politik mampu memudahkan penyebaran informasi, akan tetapi hal ini juga memunculkan banyak bentuk disinformasi yang mampu memengaruhi pandangan politik masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah guna mengetahui hubungan dari penyebaran disinformasi di media sosial dengan kemunculan polarisasi sosial di tengah masyarakat Kota Medan selama pelaksanaan pemilu. Penelitian ini dilakukan melalui studi literature, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hadirnya media sosial berperan besar dalam penguatan perbedaan pandangan politik, meningkatkan penyebaran hoax, dan memicu konflik serta perpecahan sosial di masyarakat. Polarisasi sosial terjadi karena masyarakat menerima informasi yang sesuai dengan pandangan politik tanpa memeriksa faktanya terlebih dahulu. Rendahnya literasi digital juga menjadi faktor yang mempercepat penyebaran disinformasi. Penelitian ini menarik kesimpulan bahwa penyebaran disinformasi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya polarisasi sosial pada pemilu di Kota Medan. Maka dari itu peningkatan literasi



digital, pengawasan dalam penyebaran informasi di media, serta edukasi politik kepada masyarakat sangat diperlukan guna meminimalisir dampak negative polarisasi social

Keyword: Polarisasi Sosial, Pemilu, Disinformasi, Masyarakat Kota Medan

PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana semua warga mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang mampu merubah hidup mereka. Demokrasi memberikan izin pada warga Negara Indonesia untuk berpartisipasi baik secara langsung maupun melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, serta pembuatan hukum. Demokrasi mencakup keadaan sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan kebebasan politik yang bebas dan setara. Sebagian orang percaya bahwa demokrasi di Indonesia tidak hanya diperlukan, tetapi juga sesuai dengan identitas bangsa Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, serta banyaknya suku, budaya, dan bahasa yang digunakan. Semua ini adalah karunia Tuhan yang harus kita syukuri (Kodi, 2018).

Indonesia merupakan Negara demokrasi yang menjadikan pemilihan umum (pemilu) sebagai sarana utama dalam menyalurkan partisipasi politik masyarakat. Dalam (Zulkarnaen et al., 2020), Nasir menyebutkan bahwa pemilihan umum merupakan suatu konsep serta gagasan besar yang merupakan sebuah proses implementasi dari demokrasi yang mana setiap warga Negara memiliki hal yang sama dalam menentukan calon pemimpin bagi mereka. Dengan adanya pemilu ini rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan Negara secara langsung ataupun tidak langsung.

Ibarat dua mata pisau, sistem pemilihan umum langsung juga memengaruhi masyarakat. Mulai dari fenomena politik uang yang sering terjadi, klientelisme politik, konflik horizontal, dan kampanye hitam yang signifikan hingga munculnya polarisasi politik yang semakin tajam. Dalam beberapa tahun terakhir, polarisasi masyarakat menjadi lebih kuat. Ini semakin meningkat ketika politik identitas menjadi pusat kontestasi politik (Nashrullah, 2023).

Dalam (Damanik, 2024), purwoto menyebutkan multikulturalisme adalah ide tentang keberagaman dalam budaya, agama, etnis, bahasa, dan tradisi di dalam masyarakat. Dalam (Damanik, 2024), Ramadani juga menjelaskan bahwa Indonesia, negara yang memiliki lebih dari 300 kelompok etnis dan 700 bahasa daerah, memiliki karakteristik multikultural. unik yang membedakan mereka satu sama lain. Peneliti mengambil salah satu kota di Indonesia untuk menjadi focus penelitian yaitu kota Medan. Sebagai ibukota dari Sumatera Utara, Kota Medan terkenal dengan keberagaman kultur serta suku bangsa yang hidup bersama sejak dahulu (Prayoga et al., 2021).

Kota Medan sendiri merupakan sebuah kota metropolitan dan pusat ekonomi dan budaya Sumatera Utara, memiliki keragaman etnis, agama, dan budaya yang luar biasa. Kehidupan multikultural kota ini menciptakan sebuah tempat unik yang menawarkan peluang dan hambatan. Perpaduan kelompok etnis Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, dan lainnya menjadi ciri khas demografi Medan. Orang-orangnya juga dihiasi dengan keanekaragaman agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha. Jalanan sosial terbentuk oleh interaksi antara kelompok agama dan etnis. yang rumit dan unik (Damanik, 2024). Keberagaman ini memperkaya dinamika kehidupan



masyarakat tetapi berpotensi akan menimbulkan gesekan sosial terutama ketika perbedaan itu dimobilisasi dalam konteks politik seperti pemilu.

Dalam konteks pemilu, polarisasi merujuk pada meningkatnya perbedaan tajam antara kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki perspektif politik yang berbeda. Polarisasi yang didasarkan pada identitas politik dapat menyebabkan perpecahan sosial, menurunkan kualitas diskursus politik, dan meningkatkan ketegangan antarkelompok. Dalam beberapa kasus, polarisasi bahkan dapat menyebabkan konflik sosial, yang berbahaya bagi stabilitas politik dan keseimbangan sosial. Ketika masyarakat terbelah menjadi dua atau lebih kelompok yang memiliki perspektif, nilai, dan kepentingan yang sangat berbeda satu sama lain, ini disebut polarisasi politik (Rahmadhani et al., 2024).

Wninggalih dalam (Ginting et al., 2024) menyebutkan bahwa beberapa tahun kebelakang media sosial menjadi platform utama dalam kampanye politik. Media sosial memainkan peran penting dalam menentukan orientasi politik pemilih utama karena mereka memungkinkan mereka untuk menerima informasi politik, berpartisipasi dalam debat politik, dan berinteraksi dengan aktivis politik dan kampanye. Media sosial juga dapat mempengaruhi pemilih primer dengan memperkuat atau mengubah keyakinan politik mereka yang sudah ada. Di era internet, masalah muncul ketika media sosial menyebarkan penipuan dan misinformasi, mempolarisasi pendapat, dan melakukan manipulasi. Melalui platform ini, kampanye fitnah dan menyerang pribadi kandidat dapat dengan mudah disebarluaskan, memengaruhi opini publik dengan informasi yang salah. Ini memiliki kemampuan untuk merusak citra kandidat dan memengaruhi keputusan pemilih tanpa dasar yang kuat, sementara algoritme platform tersebut memberikan pengguna perspektif yang sama dan meningkatkan polarisasi sitompul.

Dalam era di mana teknologi digital mendominasi komunikasi, peran media sosial dalam memengaruhi partisipasi politik telah menjadi subjek perdebatan yang hangat. Ini menjadi alasan mengapa pemilu 2024 menjadi perhatian publik karena kampanye melalui media sosial menjadi fenomena baru yang mendominasi arena politik (Afrita, 2024).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan kondisi ketika masyarakat terpecah ke dalam dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan pandangan, sikap, nilai, maupun kepentingan yang tajam. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat biasa, tetapi berkembang menjadi pertentangan yang dapat memicu konflik sosial. Polarisasi menyebabkan berkurangnya interaksi yang harmonis serta meningkatnya jarak sosial antar kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, polarisasi semakin terlihat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Individu cenderung mengakses dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga memperkuat perbedaan yang sudah ada. Fenomena ini dikenal sebagai *selective exposure*, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilih informasi yang sejalan dengan pandangannya (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025a). Selain itu, polarisasi sosial juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan konflik kepentingan. Dalam kajian (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025a) dijelaskan bahwa polarisasi muncul akibat ketimpangan sosial serta perbedaan kepentingan antar kelompok yang semakin diperkuat oleh arus informasi di era digital. Dengan demikian, dapat



disimpulkan bahwa polarisasi sosial adalah proses terjadinya perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan informasi yang tidak seimbang, sehingga memicu konflik dan menghambat integrasi sosial.

Ciri-Ciri Polarisasi dalam Masyarakat

Polarisasi sosial memiliki beberapa ciri yang dapat diamati dalam kehidupan masyarakat. Pertama, adanya pembagian kelompok yang tegas, di mana masyarakat terbagi menjadi kelompok “kami” dan “mereka”. Pembagian ini menunjukkan adanya identitas sosial yang kuat dan eksklusif. Kedua, berkurangnya komunikasi antar kelompok yang berbeda pandangan. Individu cenderung hanya berinteraksi dengan kelompok yang memiliki kesamaan pemikiran, sehingga mempersempit ruang dialog dan meningkatkan kesalahpahaman. Ketiga, meningkatnya konflik sosial, baik dalam bentuk perdebatan, ujaran kebencian, maupun tindakan diskriminatif. Konflik ini seringkali dipicu oleh perbedaan pandangan yang tidak dapat diselesaikan secara konstruktif. Keempat, munculnya stereotip dan prasangka negatif terhadap kelompok lain. Stereotip ini memperkuat jarak sosial dan memperburuk hubungan antar kelompok. Menurut penelitian dalam Jurnal Pendidikan Tambusai, polarisasi sosial di era digital juga ditandai dengan meningkatnya penyebaran informasi yang tidak seimbang, sehingga memperkuat persepsi negatif terhadap kelompok lain dan memperdalam perpecahan dalam masyarakat (Fitrisia & Fatimah, n.d.)

Teori Konflik (Karl Marx)

Teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx menjelaskan bahwa masyarakat pada dasarnya berada dalam kondisi pertentangan yang terus-menerus akibat perbedaan kepentingan. Konflik ini terutama terjadi dalam bidang ekonomi, di mana terdapat ketimpangan antara kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya dengan kelompok yang tidak memilikinya. Menurut Marx, konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial, karena setiap kelompok berusaha mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya. Dalam konteks polarisasi sosial, teori konflik menjelaskan bahwa perpecahan dalam masyarakat muncul akibat adanya perbedaan kepentingan yang tidak dapat disatukan. Penelitian dalam SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial menunjukkan bahwa polarisasi sosial di era media sosial semakin diperkuat oleh konflik kepentingan yang disebarakan melalui informasi digital, sehingga memperbesar jarak antar kelompok (Aldi Sajjan & Ardan Alif, 2025a) Dengan demikian, teori konflik memberikan pemahaman bahwa polarisasi sosial merupakan hasil dari pertentangan kepentingan yang terus berkembang dalam masyarakat.

Teori Interaksionisme Simbolik (George Herbert Mead)

Teori interaksionisme simbolik yang dikembangkan oleh George Herbert Mead menekankan bahwa interaksi sosial terjadi melalui simbol dan makna yang dipahami bersama. Individu membentuk realitas sosial melalui proses interpretasi terhadap simbol, seperti bahasa, komunikasi, dan tindakan sosial. Dalam konteks polarisasi sosial, teori ini menjelaskan bahwa perbedaan dalam menafsirkan informasi dapat menyebabkan perbedaan persepsi antar kelompok. Informasi yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh kelompok yang berbeda, sehingga memperkuat perpecahan dalam masyarakat. Menurut penelitian dalam Jurnal (Fitrisia & Fatimah, n.d.), perbedaan interpretasi terhadap informasi di media sosial dapat memperkuat polarisasi karena individu cenderung memahami informasi sesuai dengan sudut pandang kelompoknya Dengan



demikian, interaksionisme simbolik membantu menjelaskan bagaimana makna yang berbeda dalam komunikasi dapat memicu dan memperkuat polarisasi sosial.

Media Sosial dan Polarisasi

1. Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini

Media sosial merupakan sarana komunikasi yang sangat berpengaruh dalam membentuk opini publik. Melalui media sosial, informasi dapat disebarkan dengan cepat dan menjangkau banyak orang dalam waktu singkat. Namun, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu memperkuat polarisasi sosial. Hal ini terjadi karena pengguna cenderung mengonsumsi informasi yang sesuai dengan pandangannya. Fenomena ini dikenal sebagai *selective exposure*, yang menyebabkan individu semakin yakin terhadap pendapatnya dan menolak pandangan lain (Sitorus et al., 2024). Selain itu, algoritma media sosial juga berperan dalam memperkuat polarisasi dengan menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini menyebabkan terbatasnya paparan terhadap informasi yang berbeda dan mempersempit perspektif individu.

2. Echo Chamber

Echo chamber adalah kondisi ketika individu hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan keyakinannya. Dalam situasi ini, individu jarang mendapatkan informasi yang berbeda, sehingga pandangannya menjadi semakin kuat dan sulit berubah. Fenomena echo chamber banyak terjadi di media sosial, di mana pengguna cenderung mengikuti akun atau bergabung dengan kelompok yang memiliki pandangan yang sama. Menurut penelitian dalam *Journal* (Khairina et al., n.d.), echo chamber menyebabkan individu semakin tertutup terhadap perbedaan dan memperkuat polarisasi sosial.

3. Disinformasi

Disinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan dengan tujuan tertentu. Dalam era digital, disinformasi dapat menyebar dengan sangat cepat melalui media sosial. Disinformasi dapat memperburuk polarisasi karena memicu kesalahpahaman dan memperkuat konflik antar kelompok. Informasi yang tidak akurat dapat mempengaruhi opini publik dan memperbesar perbedaan yang ada dalam masyarakat (Fitrisia & Fatimah, n.d.).

4. Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian adalah bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, provokasi, atau hasutan terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam media sosial, ujaran kebencian dapat menyebar dengan cepat dan memicu konflik sosial. Konten yang bersifat emosional dan provokatif cenderung lebih mudah menarik perhatian pengguna, sehingga mempercepat penyebaran ujaran kebencian. Hal ini pada akhirnya memperkuat polarisasi dan memperburuk hubungan antar kelompok dalam masyarakat (Restu Alam et al., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam fenomena polarisasi sosial dalam konteks pemilu serta kaitannya dengan penyebaran disinformasi di media sosial. Studi literatur merupakan kegiatan menelaah dan mengkaji berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti buku,



artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi akademik lainnya yang telah dipublikasikan sebelumnya. Melalui metode ini, peneliti berupaya membangun landasan teoritis yang kuat terkait konsep polarisasi sosial, perilaku politik masyarakat, serta dinamika penyebaran disinformasi di ruang digital. Selain itu, studi literatur juga berfungsi untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian (*research gap*), menghindari duplikasi penelitian, serta menemukan unsur kebaruan (*novelty*) dalam kajian yang dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada analisis kritis terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks masyarakat Kota Medan.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur ilmiah. Sumber data tersebut meliputi: Buku teks yaitu karya ilmiah, Artikel jurnal ilmiah, baik nasional maupun internasional. Sumber-sumber tersebut diperoleh melalui platform akademik seperti Google Scholar, Scopus, SINTA, Garuda, serta portal e-journal perguruan tinggi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelusuran literatur dengan menggunakan kata kunci (*keywords*) yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan kata kunci bertujuan agar data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan fokus kajian. Adapun kata kunci yang digunakan antara lain: polarisasi sosial, pemilu, disinformasi, hoaks, media sosial, perilaku politik, echo chamber, filter bubble, literasi digital, partisipasi politik, konflik sosial, dan masyarakat Kota Medan. Untuk menjaga aktualitas data, penelitian ini menggunakan batasan tahun publikasi dalam rentang 10 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2017 hingga 2026.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: Reduksi data, dengan memilih dan menyederhanakan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kategorisasi data, dengan mengelompokkan data ke dalam tema-tema utama, seperti faktor penyebab polarisasi sosial, peran media sosial dalam memperkuat disinformasi, serta dampak polarisasi terhadap kohesi sosial masyarakat. Interpretasi data, yaitu memberikan pemaknaan terhadap temuan yang diperoleh untuk memahami hubungan antara polarisasi sosial dan penyebaran disinformasi dalam konteks pemilu di Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial merupakan kondisi ketika masyarakat terpecah ke dalam dua atau lebih kelompok yang memiliki perbedaan pandangan, sikap, nilai, maupun kepentingan yang tajam. Perbedaan tersebut tidak hanya bersifat biasa, tetapi berkembang menjadi pertentangan yang dapat memicu konflik sosial. Polarisasi menyebabkan berkurangnya interaksi yang harmonis serta meningkatnya jarak sosial antar kelompok dalam masyarakat. Dalam konteks masyarakat modern, polarisasi semakin terlihat seiring dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial. Individu cenderung mengakses dan mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga memperkuat perbedaan yang sudah ada. Fenomena ini dikenal sebagai *selective exposure*, yaitu kecenderungan seseorang untuk memilih informasi yang sejalan dengan pandangannya (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025a). Selain itu, polarisasi sosial juga berkaitan erat dengan struktur sosial dan konflik kepentingan. Dalam kajian (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025a) dijelaskan bahwa polarisasi muncul akibat ketimpangan sosial serta perbedaan kepentingan antar



kelompok yang semakin diperkuat oleh arus informasi di era digital. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa polarisasi sosial adalah proses terjadinya perpecahan dalam masyarakat akibat perbedaan kepentingan, nilai, dan informasi yang tidak seimbang, sehingga memicu konflik dan menghambat integrasi sosial.

Ciri-Ciri Polarisasi dalam Masyarakat

Polarisasi sosial dalam Pemilu 2024 di Kota Medan tidak terjadi secara spontan, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara berbagai faktor struktural dan kultural. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek politik, identitas, dan media sosial yang saling berkelindan dalam membentuk dinamika polarisasi. Faktor pertama adalah faktor politik yang berkaitan dengan strategi dan praktik dalam kontestasi pemilu. Dalam sistem demokrasi elektoral, kompetisi antar kandidat mendorong munculnya berbagai strategi untuk memenangkan dukungan publik. Salah satu strategi yang sering digunakan adalah framing isu secara konfrontatif untuk membedakan kandidat dengan lawannya. Dalam konteks ini, aktor politik tidak hanya berusaha membangun citra positif bagi dirinya, tetapi juga menciptakan citra negatif terhadap lawan politik.

Penggunaan buzzer politik dan propaganda digital menjadi salah satu instrumen utama dalam strategi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa buzzer memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik melalui penyebaran narasi tertentu secara masif dan terkoordinasi (Wahyu et al., 2025). Dalam banyak kasus, narasi yang disebarkan bersifat provokatif dan emosional, sehingga lebih mudah memicu reaksi dari masyarakat. Hal ini menyebabkan polarisasi semakin tajam karena masyarakat terpapar pada informasi yang bias dan cenderung memperkuat posisi kelompoknya masing-masing.

Faktor kedua adalah faktor identitas yang meliputi agama dan etnis. Kota Medan sebagai kota dengan keragaman etnis dan agama memiliki potensi tinggi terhadap mobilisasi politik berbasis identitas. Dalam konteks pemilu, identitas sering kali digunakan sebagai alat untuk menggalang dukungan dengan memanfaatkan kedekatan emosional antar anggota kelompok.

Isu-isu yang berkaitan dengan agama dan etnis cenderung lebih sensitif dan memiliki daya mobilisasi yang tinggi. Oleh karena itu, tidak jarang isu-isu tersebut dimanfaatkan dalam kampanye politik, baik secara eksplisit maupun implisit. (Cahyadi, 2024) menunjukkan bahwa ujaran kebencian berbasis identitas meningkat selama periode kampanye, yang menunjukkan bahwa identitas menjadi faktor penting dalam polarisasi politik.

Faktor ketiga adalah media sosial yang berperan sebagai akselerator utama polarisasi. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai ruang produksi dan distribusi informasi politik. Algoritma media sosial yang dirancang untuk meningkatkan engagement pengguna cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Hal ini menciptakan fenomena *echo chamber* dan *filter bubble*, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang sejalan dengan pandangannya (Rafiq & Devi, 2026).

Fenomena ini menyebabkan terjadinya penguatan sikap (*attitude reinforcement*) yang membuat individu semakin yakin dengan pandangannya dan semakin sulit menerima perspektif yang berbeda. Selain itu, media sosial juga memungkinkan penyebaran disinformasi secara cepat dan luas tanpa melalui proses verifikasi yang memadai.



Rendahnya literasi digital masyarakat menjadi faktor yang memperparah kondisi tersebut. Banyak masyarakat yang belum memiliki kemampuan untuk membedakan antara informasi yang valid dan yang tidak valid. (Mafindo, 2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi hoaks masyarakat masih relatif rendah, sehingga mereka rentan terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks Kota Medan, kombinasi antara tingginya penggunaan media sosial, rendahnya literasi digital, serta keberagaman identitas sosial menciptakan kondisi yang ideal bagi berkembangnya polarisasi. Ketiga faktor tersebut saling memperkuat satu sama lain, sehingga polarisasi tidak hanya terjadi selama periode pemilu, tetapi juga berpotensi berlanjut dalam kehidupan sosial masyarakat setelah pemilu selesai.

Dengan demikian, polarisasi sosial dalam Pemilu 2024 di Kota Medan dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh interaksi antara faktor politik, identitas, dan media sosial. Tanpa adanya upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, polarisasi berpotensi menjadi masalah struktural yang dapat mengancam kohesi sosial dan kualitas demokrasi di tingkat lokal maupun nasional.

Peran Media Sosial

Salah satu perkembangan teknologi komunikasi yang paling signifikan adalah media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga membentuk opini publik, menyebarkan informasi, dan memengaruhi dinamika konflik sosial. Dengan demikian, peran media sosial menjadi sangat kompleks karena memiliki efek yang baik dan buruk. Menurut penelitian Adiwibowo & Larasati (Adiwibowo & Larasati, 2025), media sosial telah menjadi sumber utama informasi masyarakat, yang berdampak besar pada persepsi publik tentang berbagai masalah. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat modern lebih bergantung pada media sosial daripada media konvensional untuk mendapatkan informasi.

1. Penyebaran Informasi Cepat

Media sosial sangat penting karena dapat menyebarkan informasi dengan cepat. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara real-time tanpa batasan ruang dan waktu, berbeda dengan media konvensional seperti televisi atau surat kabar. Setiap orang, baik produsen maupun konsumen, dapat berfungsi sebagai sumber dan penerima informasi. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, termasuk dalam situasi global seperti konflik internasional, yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat global (Octaguna et al., 2023). Dengan demikian, meskipun media sosial memudahkan akses ke informasi, literasi digital diperlukan agar masyarakat dapat menyaring informasi secara kritis dan menghindari hoaks. Integritas dosen menjadi berkurang

2. Pembentukan Opini Publik

Media sosial tidak hanya berfungsi untuk menyebarkan informasi, tetapi juga berfungsi sebagai ruang publik digital di mana orang dapat berbicara tentang masalah, menyampaikan pendapat, dan memberikan tanggapan. Penelitian William & Loisa (Yohanes William & Riris Loisa, 2025) menunjukkan bahwa media sosial digunakan secara strategis untuk membentuk opini publik, termasuk dalam konteks kebijakan pemerintah melalui berbagai platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu, menurut



Kusumaningsih (Kusumaningsih, 2024), media tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membongkai masalah, yang dapat berdampak pada cara orang memahami masalah. Oleh karena itu, media sosial memiliki kekuatan yang signifikan untuk membentuk opini publik dan bahkan dapat membentuk pandangan umum masyarakat mengenai masalah tertentu

3. Memperkuat Konflik Sosial

Selain memiliki manfaat, media sosial juga dapat menyebabkan konflik sosial karena memungkinkan berbagai pendapat berkembang menjadi konflik. Media sosial dapat menghasilkan echo chamber dan filter bubble, di mana orang hanya akan terpapar pada informasi yang sesuai dengan perspektif mereka. Akibatnya, orang menjadi kurang terbuka terhadap pendapat orang lain dan lebih cenderung mempertahankan keyakinan mereka sendiri. Media sosial juga telah berubah menjadi arena "perang informasi", di mana berbagai kelompok menggunakannya untuk menyebarkan cerita untuk mempengaruhi pendapat publik (Hayati et al., 2025). Studi Abdullah dan Sundari (Abdullah & Sundari, 2025) menunjukkan bahwa dalam konteks konflik global, media sosial dapat digunakan untuk menggerakkan opini publik dan memperkuat gerakan sosial melalui penggunaan hashtag. Contohnya adalah konflik Palestina-Israel. Ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya mempercepat penyebaran informasi, tetapi juga memiliki potensi untuk menimbulkan konflik melalui, Penyebaran ujaran kebencian, provokasi dan propaganda, polarisasi sosial, atau "kami vs mereka" Oleh karena itu, konflik kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar dan tersebar luas di masyarakat

Analisis Teoritis

1. Teori Konflik

Teori konflik yang dipelopori oleh Karl Marx mengatakan bahwa masyarakat selalu dipenuhi dengan pertentangan kepentingan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam dunia media sosial, konflik ini terjadi karena perbedaan ideologi, kepentingan, dan akses terhadap informasi. Perbedaan kepentingan dan struktur sosial yang tidak seimbang menyebabkan polarisasi sosial di media sosial, yang meningkatkan konflik antar kelompok konflik yang meningkat di media sosial disebabkan oleh, Informasi tersebar tanpa pengawasan, cerita provokatif menjadi viral, dan kelompok saling menyerang untuk mempertahankan kepentingan mereka (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025). Oleh karena itu, konflik di media sosial merupakan pertarungan untuk kepentingan sosial yang lebih besar daripada hanya perbedaan pendapat.

2. Teori Interaksionisme Simbolik

Makna yang diberikan terhadap simbol, seperti bahasa, gambar, atau tanda, mengarahkan interaksi manusia, menurut teori interaksionisme simbolik. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Analisa Sosiologi UNS (Sarvianto, 2020), makna yang diciptakan oleh konten media sosial dapat memengaruhi cara orang melihat realitas sosial dan bahkan menciptakan ketimpangan sosial baru. Selain itu, interpretasi simbolik yang berkembang, menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Sains Sosial dan Humaniora (Rahma et al., 2024), memengaruhi bagaimana masyarakat menangani masalah di media sosial. Oleh karena itu, tidak hanya fakta yang menyebabkan perselisihan di media sosial, tetapi juga perbedaan makna antara simbol dan informasi.



Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi dampak negatif polarisasi sosial, diperlukan berbagai solusi yang melibatkan individu, masyarakat, dan pemerintah.

1. Edukasi Literasi Digital

Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Untuk memastikan bahwa masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu dan provokasi, penting bagi orang-orang untuk memperoleh pengetahuan ini. Penelitian (Heuvelman et al., 2025) menunjukkan bahwa literasi digital dapat membantu masyarakat menyaring data dan meningkatkan interaksi media sosial. Manfaat literasi digital:

- a. Mengurangi penyebaran hoaks
- b. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis
- c. Mendorong penggunaan media sosial secara bijak

2. Penguatan Nilai Toleransi

Toleransi adalah kunci utama untuk menjaga masyarakat yang beragam bersatu. Dalam konteks media sosial, ini penting agar perbedaan tidak berkembang menjadi konflik. Dalam penelitian SENPISHUM UNJ (Nugroho et al., 2025) menekankan betapa pentingnya membangun interaksi yang ramah dan inklusif dalam masyarakat multikultural di dunia digital. Upaya yang dapat dilakukan:

- a. Menghargai perbedaan pendapat
- b. Menghindari ujaran kebencian
- c. Membangun dialog yang sehat

3. Regulasi Media Sosial

Regulasi diperlukan untuk menghentikan penyebaran informasi yang merugikan, seperti hoaks dan ujaran kebencian. Peraturan digital seperti perlindungan data pribadi dan Undang-Undang ITE sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban dunia digital. Tujuan regulasi yaitu, mencegah penyebaran informasi yang berbahaya, melindungi pengguna media sosial, dan menjaga kestabilan sosial (Heuvelman et al., 2025).

4. Peran Pemerintahan dan Masyarakat

Dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi polarisasi sosial. Peran Pemerintah yaitu, membuat kebijakan yang adil dan transparan Mengawasi platform media sosial Mendidik masyarakat tentang literasi digital. Sedangkan peran masyarakat yaitu, menggunakan media sosial secara bijak Tidak menyebarkan informasi yang belum jelas Mendorong diskusi konstruktif. Penelitian ini menunjukkan bahwa menggabungkan kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk mengurangi efek polarisasi sosial (Aldi Sajian & Ardan Alif, 2025).

KESIMPULAN

Secara konseptual, hasil analisis ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah sistem yang menjamin partisipasi politik nasional secara terpadu, dengan masyarakat umum berperan sebagai instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, proses



demokrasi dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik yang kompleks yang seringkali menimbulkan konsekuensi yang tidak terduga, salah satunya adalah polarisasi sosial. Dalam konteks komunitas multikultural seperti Kota Medan, struktur keberagaman yang mencakup aspek etnis, agama, dan budaya merupakan modalitas sosial yang berpotensi memperkuat integrasi. Namun, ketika isu-isu tersebut dipolitisasi, terutama dalam kontestasi pemilu, identitas sosial berubah menjadi alat mobilisasi politik. Hal ini menyebabkan pergeseran rasionalitas pilihan politik ke arah identitas yang egosentris, yang berujung pada polarisasi akibat diskriminasi sosial “in-group” dan “out-group”.

Singkatnya, media sosial dapat berfungsi sebagai variabel pendorong yang mempercepat proses polarisasi. Karakteristik media sosial berbasis algoritma mencakup ruang gema (echo chambers) dan gelembung filter (filter bubbles), yang meningkatkan paparan selektif dan bias konfirmasi di kalangan pengguna. Dalam situasi ini, disinformasi dan konten yang sarat emosi menyebar luas, yang tidak hanya mendistorsi realitas tetapi juga menurunkan kualitas rasionalitas dalam wacana publik. Implikasi dari fenomena ini tidak terbatas pada politik elektoral, melainkan meluas ke aspek sosial masyarakat. Polarisasi berkontribusi pada eskalasi konflik simbolis, disintegrasi sosial, dan erosi kepercayaan antarindividu atau kelompok. Dalam jangka panjang, situasi ini berpotensi mengikis kohesi sosial dan merusak stabilitas sosial-politik secara lebih mendalam.

Akibatnya, polarisasi sosial dalam konteks pemilu dapat dipahami sebagai fenomena multifaset yang timbul dari interaksi antara faktor struktural (politik), budaya (identitas), dan teknologi (media sosial). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan integratif melalui literasi digital, penanaman nilai-nilai toleransi, optimalisasi regulasi ruang digital, serta kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat. Upaya-upaya tersebut sangat penting dalam mempromosikan demokrasi inklusif dan meminimalkan kemungkinan disintegrasi sosial dalam masyarakat yang pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R., & Sundari, R. (2025). Peran Media Sosial Dalam Mobilisasi Opini Publik Selama Konflik Palestina-Israel: Studi Kasus Hashtag Free Palestine. *JKP) Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 341–357.
- Adiwibowo, B. S., & Larasati, A. (2025). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik dan Pola Partisipasi Politik Generasi Milenial. *COMSERVA : Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(11), 4920–4928. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i11.2988>
- Afrita, J. (2024). *PEMILU 2024: MENINJAU DAMPAK KAMPANYE MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK*. 9, 83–95.
- Aldi Sajjan, & Ardan Alif. (2025a). Struktur dan Konflik Sosial: Perspektif Teori Sosiologi terhadap Polarisasi di Era Media Sosial. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 4(1), 309–314. <https://doi.org/10.55681/seikat.v4i1.1632>
- Cahyadi, A. Y. (2024). *Kampanye Pemilu 2024, Ujaran Kebencian terhadap Kelompok Minoritas Meningkat*. Aliansi Jurnalis Independen.
- Damanik, F. H. S. (2024). Kehidupan Multikultural di Kota Medan: Dinamika, Tantangan, dan Peluang. *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial*, 8(1), 60–67. <https://doi.org/10.30743/mkd.v8i1.8503>



- Fitrisia, A., & Fatimah, S. (n.d.). *Peran Teori Ilmiah dalam Menyikapi Disinformasi dan Polarisasi Sosial*.
- Ginting, D. T. N., Tan, T., Alex, A., Nurlaila, N., Gultom, S. N., Cindy, C., Tan, C., Valencia, C., Ronaldo, D., Maulana, F. H., Gabriella, G., Al Islami, G., Aurelia, J., Jeny, J., Alexander, M., Sherryne, S., Wong, S., Thresdianto, T., & Wijaya, V. (2024). Pengaruh Media Sosial dalam Kampanye Politik terhadap Hasil Pemilu. *Dst*, 4(2), 123–130. <https://doi.org/10.47709/dst.v4i2.4590>
- Hayati, M., Ali, Y., Triadi, I., Setyawibawa, R., & Uksan, A. (2025). *Konflik Siber dan Keamanan Nasional : Analisis Penyebaran Narasi Separatis OPM di Media Sosial*. 5(1), 2236–2246.
- Heuvelman, S. S., Betaubun, R. M. N., & Pujiati, S. (2025a). Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital. *Papsel Law Journal*, 1(2), 67–75.
- Heuvelman, S. S., Betaubun, R. M. N., & Pujiati, S. (2025b). Konstruksi Identitas Keluarga di Media Sosial: Analisis Sosiologi Hukum tentang Perlindungan Privasi dan Dampak Regulasi Digital. *Papsel Law Journal*, 1(2), 67–75.
- Khairina, J., Faza, K., Haris, M. Z., Kharisma, R., & Nayla, Y. (n.d.). Fenomena Echo Chamber di Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Polarisasi Politik bagi Mahasiswa. *Bulan Tahun Journal of Civics and Education Studies*, 9(2).
- Kodi, D. (2018). Demokrasi dan Budaya Politik. *Sociae Polites*, Vol. 5 No.
- Kusumaningsih, R. (2024). Rila Kusumaningsih. *Peran Media Dalam Mempengaruhi Opini Publik Tentang Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 27–40.
- Mafindo. (2024). *Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkatkan Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia*.
- Nashrullah, J. (2023). Polarisasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Realism: Law Review*, 1(2), 20–38. <https://doi.org/10.71250/rlr.v1i2.15>
- Nugroho, H. I., Riyadi, A. P., Khaira, Z. J., & Qanita, D. (2025). *Sosiologi Digital : Analisis Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Identitas dan Toleransi dalam Masyarakat Multikultural Indonesia*. 1–6.
- Octaguna, A., Putri, A. I., Matthew, K., & Universitas, H. (2023). *23-Moderasi-0101-464 (1)*. (September), 1–17. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Prayoga, D. R., Leontinus, G., Ginting, T. D., Damayani, W. N., Rohani, & Z, S. (2021). Kerukunan Hidup Masyarakat Dalam Bingkai Multikultural Di Kampung Madras Kota Medan. *Jurnal Samudra Geografi*, 4(1), 30–38. <https://doi.org/10.33059/jsg.v4i1.3053>
- Rafiq, B. R., & Devi, A. W. (2026). Polarisasi Politik Gen Z pada Aksi Demonstrasi Agustus 2025 Melalui Sosial Media TikTok. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*. <https://doi.org/https://doi.org/10.53697/iso.v6i2.4030>
- Rahma, R. M., Kurnia, A., Ramdhani, A. N., & Listyani, R. H. (2024). Kajian Interaksionisme Simbolik terhadap Pengakuan Non-Binary Mahasiswa Universitas Hasanuddin dalam Media Sosial Twitter. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 8(1), 65. <https://doi.org/10.30595/jssh.v8i1.15574>
- Rahmadhani, A., Tarigan, F. S. B., Gorat, L. M. B., Sinaga, N. N., & Zai, F. P. D. (2024). Politik Identitas dan Polarisasi Dalam Pemilu. *Indonesian Journal of Education and Development Research*, 3(1), 364–369. <https://doi.org/10.57235/ijedr.v3i1.4671>



- Restu Alam, J., Yudho Prakoso, L., Azhari, Y., Setiawibawa, R., & Uksan, A. (2025). *THE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA IN THE SPREAD OF POLARIZATION AND PEACE COUNTER-NARRATIVE EFFORTS IN INDONESIA* (Vol. 5).
- Sarvianto, D. F. (2020). Dilema Dwifungsi Pemanfaatan Informasi Dalam Pembentukan Ketimpangan Sosial Baru Di Indonesia (Telaah Sosiologi Digital Melalui Perspektif Interaksionisme Simbolik). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 9(2), 493–509. <https://doi.org/10.20961/jas.v9i2.43452>
- Sitorus, H. J., Tanoyo, M., & . I. (2024). Polarisasi Politik Melalui Interaksi Sosial Di Instagram: Studi Kasus Pemilu 2024 Di Indonesia. *JKOMDIS : Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial*, 4(2), 383–394. <https://doi.org/10.47233/jkomdis.v4i2.1675>
- Wahyu, O. T., Redni, M. P., & Rayla, P. O. (2025). *Buzzer Politik dan Era-Post Truth: Ancaman Bagi Demokrasi Lokal di Indonesia*. KPU.GO.ID.
- Yohanes William, & Riris Loisa. (2025). Peran Media Sosial dalam Membangun Opini Publik: Studi Kasus Akun Media Sosial DPR RI. *Kiwari*, 4(3), 426–434. <https://doi.org/10.24912/ki.v4i3.35405>
- Zulkarnaen, F., Adara, A. S., Rahmawati, A., Wartadiayu, L., & Pamungkas, M. D. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Milenial pada Pemilu di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 5(2), 55–63. <https://doi.org/10.35706/jpi.v5i2.4554>